



# PEMDA DISURUH EFISIENSI BELANJA PEGAWAI TETAP TINGGI

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 2





# APBD Perubahan Berau Naik Tapi Was-was Pemotongan Pusat

**P**EKAN ini, Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Berau menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 sebesar Rp6,041 triliun atau naik Rp788 miliar dari sebelumnya Rp5,252 triliun.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menjelaskan, pada perubahan APBD 2025, pendapatan Kabupaten Berau ditetapkan sebesar Rp5.367.995.956.905,72 atau bertambah Rp603.407.292.905,72 dari sebelumnya pada APBD Murni 2025 sebesar Rp4.764.588.664.000.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6.041.427.000.000 atau bertambah Rp788.834.000.000 dari sebelumnya pada APBD Murni 2025 sebesar Rp5.252.593.000.000,00.

Kemudian, pembiayaan ditetapkan sebesar Rp673.431.043.094,28 atau bertambah Rp185.426.707.094,28 dari sebelumnya pada APBD Murni 2025 sebesar Rp488.004.336.000.

Sri Juniarsih mengaku bersyukur kesepakatan bersama terhadap perubahan APBD 2025 dapat diselesaikan, meskipun pada tahun ini mengalami keterlambatan di dalam tahapan penyampaian kepada DPRD Berau.

"Hal ini disebabkan Pemkab Berau menunggu kepastian adanya tambahan dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," kata Sri Juniarsih saat Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, belanja daerah pada sisa anggaran 2025 diprioritaskan untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk mengoptimalkan kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah juga men-



galokasikan kebutuhan belanja mendukung kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti kekurangan gaji ASN dan non ASN.

Anggaran perubahan juga digunakan untuk belanja sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pariwisata, peningkatan jalan, drainase, irigasi dan air. Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pembayaran kewajiban utang belanja beberapa SKPD atas pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir 2024.

"Kita semua tentu berharap proses pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Sehingga, program-program pro rakyat harus menjadi fokus utama kita melalui prioritas pembangunan yang kita tetapkan yang disempurnakan pada perubahan APBD 2025," terangnya.

Dengan ditetapkannya perubahan APBD 2025, maka pemerintah daerah dan legislatif mempunyai tanggung jawab yang sama untuk pembangunan di Bumi Batiwakkal. Untuk itu, Sri Juniarsih mengajak semua agar senantiasa mendukung dan memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

"Kami yakin dan percaya dengan semangat kebersamaan dan soliditas di antara kita semua, Kabupaten Berau akan menjadi daerah yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera," ujarnya.

Di sisi lain, di tengah kabar pemotongan dana transfer ke daerah (TKD), Sri Juniarsih, menyatakan tak mau bersikap berlebihan.

Bahkan, dia mengaku sudah mengirimkan tim dari Pemkab Berau ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mencari kepastian pemotongan TKD.

"Minggu lalu tim sudah berangkat, cari tahu informasi yang lebih valid," kata Sri Juniarsih, Selasa (23/9/2025).

Dia tak mau kecewa karena menaruh harapan besar di tengah ketidakpastian kebijakan pemangkasan tersebut. Namun, yang hendak dipastikan, pemerintah saat ini masih menggantungkan harapan pada dana perimbangan tersebut.

Tak hanya komunikasi ke pusat, dana yang mengalir dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga turut dicari kepastiannya. Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim juga menjadi nafas anggaran pembangunan di Bumi Batiwakkal.

Berkaca dalam pembangunan infrastruktur tahun lalu, Sri mencontohkan, jalan di kawasan pesisir dibangun menggunakan dana Bankeu 2024.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan informasi yang diterima pemerintah tetap terjadi pemotongan TKD yang berkisar 50-70 persen. Situasi ini membuat pemerintah menyiapkan berbagai macam alternatif ketika kebijakan tersebut diterapkan.

"Kami juga masih menunggu keputusan baru dari Kemenkeu," kata dia.

Dia mengungkapkan, diperlukan tahapan panjang ketika pemangkasan TKD tetap dilakukan. Sebab proyeksi APBD telah ditetapkan dan harus diberikan penyesuaian ketika belanja daerah tak sesuai dengan proyeksi APBD tahun depan.

(SULAIMAN)

## APB Berau 5 Tahun Terakhir



Tahun Anggaran	APBD Murni	APBD Perubahan	Kenaikan
2021	Rp 1.850.396.286.000,00	Rp 2.676.500.000.000,42	Rp 826.103.714.000,42
2022	Rp 2.050.800.000.000,00	Rp 3.395.928.000.000,00	Rp 1.345.128.000.000,00
2023	Rp 3.639.000.000.000,00	Rp 5.176.947.000.000,00	Rp 1.537.947.000.000,00
2024	Rp 5.074.960.000.000,00	Rp 6.991.000.000.000,00	Rp 1.916.040.000.000,00
2025	Rp 5.252.593.000.000,00	Rp 6.041.427.000.000	Rp 788.834.000.000

Pada awal tahun ini, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD 2025. SE itu sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 mengenai efisiensi belanja dalam APBN serta APBD.

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan anggaran dengan membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar atau diskusi kelompok terarah. Selain itu, belanja perjalanan dinas juga diminta untuk dikurangi hingga 50 persen bagi seluruh perangkat daerah.

Anggaran hasil penghematan itu akan dialihkan atau direalokasi untuk anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta program-program lain yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam APBD Berau 2025, publik bisa melihat anggaran yang dibelanjakan untuk pegawai terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan, tahun ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang tercantum dalam dokumen penjabaran APBD Murni mencatatkan angka yang cukup besar hampir Rp 200 miliar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2025 ditetapkan sebesar Rp5,252 triliun, kemudian mengalami perubahan menjadi Rp6,041 triliun atau meningkat Rp788,8 miliar. Pada 2024, APBD murni Berau sebesar Rp5,074 triliun yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp6,991 triliun.

Dalam dokumen Peraturan Bupati Berau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebanyak Rp1.012.406.992.519,10 dialokasikan untuk belanja pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Belanja Pegawai BLUD.

Gaji dan Tunjangan ASN dalam APBD 2025 dianggarkan sebesar Rp 448.260.240.636,10. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 409.706.547.997,00.

ASN Berau juga mendapatkan Tambahan Penghasilan sebesar Rp 530.226.760.286,00. Jumlah ini juga lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 371.270.186.494,00.

Selanjutnya, Gaji dan Tunjangan DPRD dalam APBD tahun ini sebesar Rp 22.668.895.898,00. Jumlah ini turun sedikit dibanding tahun lalu sebesar Rp 22.820.839.088,00.

Kemudian, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun ini dianggarkan Rp 676.619.699,00 atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 591.834.748,00.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Berau juga mendapatkan penerimaan lainnya sebesar Rp 925.500.000,00. Angka ini juga masih sama dengan yang dianggarkan pada APBD 2024.

Sementara itu, APBD Berau 2025 juga dialokasikan untuk belanja pegawai BUMD sebesar Rp 8.652.676.000,00. Jumlah ini turun sekitar 50 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 16.841.592.800,00.

Selain belanja pegawai, APBD murni Berau 2025 juga dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, serta belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan.

Belanja perjalanan dinas tahun ini sebesar Rp 191.134.649.000,00 atau lebih besar dari anggaran perjalanan dinas tahun lalu sebesar Rp 163.656.238.000,00.

Lalu, belanja makanan dan minuman rapat tahun ini Rp 21.880.518.000,00 atau lebih besar dari tahun lalu Rp 19.766.032.250,00.

Kemudian, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan tahun ini dianggarkan Rp 17.379.356.000,00 atau lebih besar dari tahun lalu Rp 13.038.314.900,00.

## Perbandingan Belanja Pegawai 2024 dan 2025



### Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

APBD 2024 Rp 409.706.547.997,00  
APBD 2025 Rp 448.260.240.636,10

### Belanja Tambahan Penghasilan ASN

APBD 2024 Rp 371.270.186.494,00  
APBD 2025 Rp 530.226.760.286,00

### Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

APBD 2024 Rp 147.134.135.222,00  
APBD 2025 Rp 86.943.029.991,00

### Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

APBD 2024 Rp 22.820.839.088,00  
APBD 2025 Rp 22.668.895.898,00

### Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

APBD 2024 Rp 591.834.748,00  
APBD 2025 Rp 676.619.699,00

### Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

APBD 2024 Rp 925.500.000,00  
APBD 2025 Rp 925.500.000,00

### Belanja Pegawai BLUD

APBD 2024 Rp 16.841.592.800,00  
APBD 2025 Rp 8.652.676.000,00

### Belanja Perjalanan Dinas

APBD 2024 Rp 163.656.238.000,00  
APBD 2025 Rp 191.134.649.000,00

### Belanja Makanan dan Minuman Rapat

APBD 2024 Rp 19.766.032.250,00  
APBD 2025 Rp 21.880.518.000,00

### Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

APBD 2024 Rp 3.341.985.000,00  
APBD 2025 Rp 4.195.328.000,00

### Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

APBD 2024 Rp 13.038.314.900,00  
APBD 2025 Rp 17.379.356.000,00



## Guru Honorer Minta Kejelasan Belum Digaji Sejak Juni

**G**URU honorer non database di Kabupaten Berau mengaku belum menerima gaji sejak Juni 2025. Mereka berharap ada kejelasan dari pemerintah daerah.

Kondisi ini pun menimbulkan keresahan, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari honor bulanan.

Andi, salah seorang guru honorer non database di sekolah dasar negeri di Tanjung Redeb, menuturkan sejak Juni hingga September ini belum mendapatkan kepastian pencairan gaji.

Dia menjelaskan, permasalahan ini bermula sejak Januari lalu ketika para guru honorer non database sempat dirumahkan selama tiga hari, sebelum akhirnya kembali bekerja setelah adanya SK kolektif dari Dinas Pendidikan Berau.

Namun pembayaran baru terlaksana enam bulan kemudian menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).

"Setelah itu, kami tidak boleh lagi digaji dari BOSNAS dan dialihkan menggunakan aplikasi INAPROC dengan skema membeli jasa perorangan. Tapi sudah tiga bulan berjalan, hasilnya tetap sama, belum gajian juga," terangnya.

Menurut keterangan bendahara sekolah, keterlambatan ini terjadi karena menunggu aturan Perbup Berau sebagai dasar pembayaran honor.

Namun hingga kini, belum ada kepastian apakah akan dialihkan ke skema lain atau tetap menunggu regulasi baru.

Meski sempat berkomunikasi dengan

pihak sekolah, para guru honorer non database mengaku belum berani menyampaikan keluhan lebih jauh ke pemerintah daerah. Kepala sekolah disebut hanya bisa menenangkan mereka agar bersabar.

"Kami hanya bisa berharap ada solusi segera. Bagaimanapun, ini hak kami sebagai tenaga pendidik," kata Andi.

Menyikapi isu terkait guru honorer di bawah 2 tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau menegaskan bahwa saat ini status tenaga honorer sudah dialihkan ke kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Dikutip dari akun Instagram @didikberaukab, Jumat (26/9/2025), untuk pencairan gaji, proses sudah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati yang saat ini dalam tahap finalisasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pendidikan Berau juga memastikan anggaran PJLP telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025, sehingga hak tenaga PJLP tetap aman dan akan segera direalisasikan sesuai aturan yang berlaku.

### NASIB HONORER

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, berkomitmen memperjuangkan nasib 114 Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer non-database yang tak lolos tes CPNS pada 2024.

Berdasarkan data, para honorer tersebut tersebar di 48 instansi, mulai dari unit

pelayanan teknis (UPT), kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dinas, hingga RSUD Talisayan dan Abdul Rivai.

Dalam aturan pengangkatan PPPK dan seleksi CPNS 2024, PTT yang telah mengikuti tes CPNS tak bisa lagi mengikuti pengangkatan untuk seleksi PPPK. Hal ini yang membuat para honorer tersebut tidak mendapatkan kesempatan naik status.

Padaحال, para honorer tersebut rata-rata telah mengabdikan diri di masing-masing instansi selama lebih dari dua tahun secara terus-menerus hingga Desember 2024. 114 honorer tersebut juga saat ini masih bekerja dengan status kontrak dinas.

Sri Juniarsih mengatakan akan mengupayakan langkah strategis untuk mengangkat para honorer tersebut menjadi PPPK paruh waktu.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, juga memastikan data tersebut telah dikelola oleh pemerintah. Saat ini, pihaknya hanya memastikan setiap nama telah sampai ke pemerintah pusat.

Secara aturan, pengangkatan PPPK paruh waktu telah diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam aturan kelima beleid tersebut, terdapat dua kategori PTT yang dapat diangkat, yakni yang telah mengikuti seleksi CPNS pada 2024 dan dinyatakan tak lulus, serta telah mengikuti seleksi PPPK namun tak dapat mengisi lowongan kebutuhan pemerintah. **(DINI DIVA APRILIA/SULAIMAN)**

## Berawal dari Hobi, Cantika Dirikan Cafe Chinggu Bernuansa Korea

**B**ERMULA dari hobi sang pemilik, Cantika Virgores yang sejak lama gemar membuat aneka kue manis seperti tiramisu, cheese cake, cinnamon rolls, cheese-cuit, hingga Korean strawberry short cake. Kafe ini lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

“Sebenarnya mimpi punya kafe ini sudah dari dulu, tapi saya memutuskan untuk mengumpulkan modal terlebih dahulu,” ujar Cantika saat ditemui pada Kamis (18/9/2025).

Sebelumnya, wanita muda ini bekerja di sebuah perusahaan tambang di Berau, menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit untuk mewujudkan mimpi besarnya itu.

Barulah pada awal April 2025, impian tersebut benar-benar terwujud. Dengan dana hasil kerja kerasnya, Cantika membangun Caffe Chinggu, nama yang diambil dari kata “chinggu” yang berarti “teman” dalam bahasa Korea.

“Harapannya, tempat ini bisa jadi tempat yang nyaman untuk semua orang, kayak sahabat sendiri. Bisa ngobrol santai sambil makan enak,” tambahnya.

Begitu melangkah kaki ke dalam Caffe Chinggu, pengunjung akan langsung disambut dengan interior yang Instagram-

able, dinding pastel, dekorasi minimalis ala drama Korea, lampu-lampu gantung yang temaram, dan alunan musik K-Pop, mulai dari Twice, Black Pink, Seventeen, hingga lagu-lagu dari BTS, boyband favorit Cantika.

Cafe Chinggu tidak hanya menjual tampilan, tapi juga rasa. Menu andalan mereka, Korean Strawberry Short Cake, menjadi favorit banyak orang karena tampilan cantik dan rasa yang lembut dan manisnya pas. Selain itu, ada juga tiramisu klasik dan cheese cake creamy yang lumer di mulut.

“Hingga saat ini pengunjung paling banyak beli Korean Strawberry Short Cake ya, karena bentuknya cantik, rasanya juga enak dan bisa buat cake merayakan ulang tahun juga,” imbuhnya.

Tak hanya makanan, Cafe Chinggu juga menyajikan berbagai minuman unik yang tak kalah menarik. Sebut saja Lotus Biscoff Creamy Latte, Cocoa Strawberry Einspinner, hingga Pistachio Matcha Latte yang tengah jadi perbincangan.

Ada juga Rosella Tea untuk yang suka minuman herbal dan segar, serta varian lainnya seperti Thai Tea, Lemon Tea, dan Blue Cloud, minuman berwarna biru yang cantik untuk difoto dan menyegarkan di lidah.

Untuk ke depannya, Cantika punya banyak rencana besar. Ia berencana menambahkan menu khas Korea lainnya seperti Gimnap dan hidangan ringan khas Negeri Ginseng.



“Saya memang suka banget sama Korea, dari musik, makanan, sampai drama. Jadi saya ingin menghadirkan sedikit suasana Korea di Berau, dan membaginya ke pengunjung,” tuturnya.

Meski baru beberapa bulan berjalan, Cafe Chinggu sudah mencuri perhatian banyak orang. Cantika menyebutkan bahwa saat ini pengunjung yang datang bisa mencapai 60 orang per hari, dengan lonjakan tertinggi di malam hari dan akhir pekan.

“Alhamdulillah, rame terus. Apalagi kalau malam dan Sabtu-Minggu, bisa full sampai malam,” ungkapnya dengan penuh syukur.

Melihat antusiasme yang tinggi, Cantika tidak menutup kemungkinan untuk memperluas area kafe dan menghad-

irkan ruangan baru yang lebih besar dan lebih tematik, mungkin dengan nuansa musim dingin atau taman bunga seperti di drama Korea.

“Semoga ke depannya, Cafe Chinggu bisa makin dikenal, makin rame, dan jadi tempat yang disukai banyak orang. Sekarang belum ada rencana buat buka cabang karena mau fokus ke satu cafe dulu,” kata dia.

Bagi kamu yang tertarik mencicipi kuliner dan dessert ala Korea bisa mampir ke Cafe Chinggu di Jalan Mardhatillah, Gayam, Tanjung Redeb, Berau. **(NADYA ZAHIRA)**





# Dana Bagi Hasil 2026 Turun, Pemkab Berau Kirim Tim ke Jakarta

**K**ABUPATEN Berau bakal mendapatkan Rp 663,9 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2026 mendatang. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025 lalu yang mencapai Rp 2,5 triliun.

Diketahui DBH merupakan salah satu dana transfer ke daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. DBH menjadi salah satu komponen penting dalam anggaran pendapatan di APBD Berau.

Berdasarkan data dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, yang dilihat Berauterkini.co.id, pada Rabu (24/9/2025), Kabupaten Berau mendapatkan alokasi DBH sebesar Rp 663,9 miliar atau tepatnya di angka Rp 663.915.990.000.

Secara rinci, DBH untuk Kabupaten Berau paling besar berasal dari komponen DBH Minerba, dengan besaran hingga Rp 572,4 miliar atau tepatnya Rp 572.421.424.000.

Selain DBH Sumber Daya Alam, komponen DBH bagi Kabupaten Berau yang terbesar lainnya berasal dari DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota, dengan besaran Rp 50,1 miliar. Atau lebih tepatnya Rp 50.179.325.000.

Komponen DBH yang terbesar selanjutnya untuk Kabupaten Berau, yaitu DBH PPh Pasal 21 dengan besaran Rp 19,8

miliar atau Rp 19.822.399.000.

Kemudian, komponen DBH yang terbesar lainnya pada tahun 2026 yaitu sektor migas yang mencapai Rp 9.173,88 miliar atau lebih tepatnya Rp 9.173.882.000.

Sementara itu, untuk besaran DBH perkebunan sawit Kabupaten Berau pada tahun depan mencapai Rp 4,8 miliar atau lebih tepatnya Rp 4.818.175.000.

Adapun untuk DBH SDA perikanan pada tahun 2025, jumlahnya paling kecil yakni hanya mencapai Rp 1 miliar atau lebih tepatnya Rp 1.004.396.000

Sedangkan untuk Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (IUPH/PSDH) pada tahun 2026 mencapai Rp 6,1 miliar atau Rp 6.188.032.000.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati menyampaikan bahwa penyaluran DBH untuk setiap daerah, termasuk Kabupaten Berau, dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue atau berdasarkan realisasi penerimaan negara.

Artinya, besaran DBH yang diterima oleh daerah sangat bergantung pada hasil penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi sumber dana, seperti pajak, cukai, dan sumber daya alam (SDA).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa fluktuasi tersebut adalah hal yang wajar dan sangat bergantung pada hasil penerimaan aktual yang masuk ke kas negara dari sektor-sektor terkait.

“Jadi wajar kalau ada penurunan, bisa saja nanti angka DBH nya berubah ke depannya” kata Viera Martina Rachmawati, Rabu (24/7/2025).

Ia menambahkan bahwa mekanisme penganggaran di pemerintah pusat bersifat dinamis dan menyesuaikan kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, meskipun pagu awal DBH Berau pada 2026 ditetapkan Rp 663,9 miliar, jumlah tersebut masih bisa berubah mengikuti perkembangan penerimaan negara di sektor-sektor yang menjadi basis DBH.

“Kita akan terus melihat perkembangan perekonomian nasional dan daerah pada tahun 2026. Jika realisasi pendapatan negara dari sektor-sektor terkait lebih

tinggi dari yang diperkirakan, maka DBH untuk daerah termasuk Berau tentu bisa meningkat,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyatakan tak mau bersikap berlebihan di tengah kabar batalnya kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang ramai beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Sri Juniarsih mengaku sudah mengirinkan tim dari Pemkab Berau ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mencari kepastian pemotongan TKD.

“Minggu lalu tim sudah berangkat, cari tahu informasi yang lebih valid,” kata Sri Juniarsih, Selasa (23/9/2025).

Dia tak mau kecewa karena menaruh harapan besar di tengah ketidakpastian kebijakan pemangkasan tersebut. Namun, yang hendak dipastikan, pemerintah saat ini masih menggantungkan harapan pada dana perimbangan tersebut.

Tak hanya komunikasi ke pusat, dana yang mengalir dari Pemprov Kaltim juga turut dicari kepastiannya. Berkaca dalam pembangunan infrastruktur tahun lalu, jalan di kawasan pesisir dibangun menggunakan dana Bankeu 2024.

“Kami juga komunikasi ke Pemprov,” ujarnya. **(NADYA ZAHIRA/SULAIMAN)**



SRI JUNIARSIH



VIERA MARTINA RACHMAWATI

## 2 Atlet Berau Menuju Borneo Games

**D**UA atlet muda Kabupaten Berau akan mengibarkan semangat olahraga di ajang Borneo Games 2025.

Mereka adalah Putra Pratama Hariadi dan Dilfa Rizky Fakhira yang terpilih mewakili Indonesia pada ajang internasional yang digelar di Kuching, Malaysia, mulai 24 September 2025.

Putra Pratama Hariadi akan turun di nomor 200 meter, 400 meter, dan estafet 4x400 meter mix. Sementara, Dilfa Rizky Fakhira bersiap unjuk kemampuan di nomor 100 meter gawang dan lompat jauh.

Sejak pulang dari Kejuaraan Nasional pada awal Agustus lalu, keduanya langsung kembali fokus menjalani program latihan intensif.

"Persiapan kami sudah cukup matang dan saat ini masuk tahap akhir. Kami menargetkan memecahkan personal best sekaligus memberikan hasil maksimal untuk Berau," ungkap Putra. Di - j ad w a l k a n m u l a i b e r l a g a p a d a



25 September, Putra mengaku optimistis pengalaman dari ajang nasional sebelumnya akan menjadi bekal berharga menghadapi persaingan ketat di Borneo Games.

Event ini merupakan salah satu pesta olahraga terbesar di Pulau Borneo yang melibatkan atlet-atlet terbaik dari Kalimantan (Indonesia), Sabah, Sarawak, dan Labuan (Malaysia), serta Brunei Darussalam.

Harapan besar pun disampaikan Pembina Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Berau, Arman Nofriansyah.

"Semoga keduanya bisa tampil maksimal dan membawa pulang prestasi tertinggi dari Borneo Games di Malaysia," ujarnya.

Kehadiran dua atlet muda ini menjadi bukti bahwa Berau memiliki potensi besar di bidang atletik, sekaligus motivasi bagi generasi penerus untuk terus berprestasi di level regional hingga internasional.

### PETINJU MUDA KE POPDA

Di tempat berbeda, petinju-petinju muda Bumi Batiwakal juga tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kalimantan Timur 2025 yang pelaksanaannya ditunda.

Diketahui, Popda Kaltim awalnya dijadwalkan berlangsung pada 2-9 Oktober 2025. Namun, penyelenggara memutuskan menunda pelaksanaannya menjadi 20-27 November 2025.

Pelatih Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Berau, La Ode Tani, menuturkan, pihaknya kini tengah mengintensifkan program

latihan untuk menghadapi Popda yang rencananya digelar di Kabupaten Paser.

"Penundaan ini justru kami anggap peluang. Ada waktu lebih untuk mengasah teknik dan memperkuat fisik atlet. Jadi, program latihan saat ini cukup padat dan terfokus," ungkap La Ode, Rabu (24/9/2025).

Pada Popda mendatang, Pertina Berau akan menurunkan empat petinju terbaik hasil seleksi dan pembinaan intensif.

Mereka adalah Abdul Fattah (kelas 46-48 kg), Haekal Juhri (kelas 54-57 kg), Muhammad Faril (kelas 57-60 kg), dan Cristian Jonas (kelas 60-63 kg).

Keempatnya telah menunjukkan perkembangan pesat, baik dari sisi teknik, strategi, maupun mental bertanding.

"Anak-anak ini disiplin, semangat, dan punya keinginan kuat untuk menang. Kami yakin mereka bisa tampil maksimal dan membawa nama baik Berau," jelasnya.

Meski Popda merupakan ajang pelajar, La Ode menegaskan tingkat persaingan tetap ketat. Banyak daerah lain juga menurunkan atlet terbaiknya.

Namun, ia optimistis petinju muda Berau bisa bersaing dan bahkan memberi kejutan.

"Kami tidak muluk-muluk menargetkan emas, tapi yang pasti kami tidak datang hanya untuk bertanding. Target kami atlet tampil membanggakan dan memberikan yang terbaik," tegasnya.

La Ode berharap, pengalaman di Popda dapat menjadi pijakan penting bagi para atlet muda Berau untuk menembus level lebih tinggi, mulai kejuaraan daerah, pekan olahraga provinsi, hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) di masa depan.

"Selain mengukur kemampuan, Popda ini juga akan jadi bahan evaluasi penting bagi pembinaan atlet," pungkasnya.

**(HENDRA IRAWAN)**



# Utusan Khusus Presiden Liburan di Berau, Zita Anjani Minta Pulau Maratua Selalu Dijaga

**S**ELAMA berlibur di Berau, Utusan Khusus Presiden bidang Pariwisata Zita Anjani terpesona dengan keindahan Pulau Maratua.

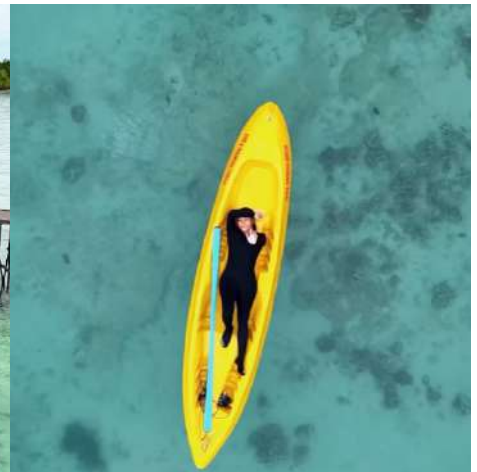
Suasana hening laguna di Pulau Maratua seakan berpadu dengan kayuhan sampan kecil berwarna kuning yang ditumpangi Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani.

Dengan baju renang hitam dan dayung biru di tangannya, ia perlahan mengelilingi air laguna yang berwarna hijau berkilau diterpa sinar matahari.

Sesekali Zita Anjani berhenti, menatap hamparan air yang tenang, lalu mengungkapkan kesan mendalamnya.

“Paling suka ini tuh karena airnya ada rasanya di hati, terus kalau air laguna begini bikin hati tenang,” ujarnya sambil tersenyum.

Keindahan laguna yang dikenal masyarakat sebagai laguna Kehe Daing itu membuatnya teringat destinasi wisata- ta lain di Indo-



nesia.

“Keindahannya mirip seperti di Sumba atau di Paisupok,” tambahnya.

Namun, kunjungan Zita Anjani ke Pulau Maratua bukan sekadar menikmati panorama alam. Ia juga menyempatkan diri hadir di sebuah yayasan pendidikan di Kalasahan, Kecamatan Pulau Maratua.

Di kelas sederhana itu, ia duduk bersama anak-anak, mengajar bahasa Inggris dan bernyanyi, sambil meny-

isipkan pesan pentingnya mencintai dan menjaga lingkungan sekitar.

Bagi Zita Anjani, pariwisata dan kelestarian alam adalah satu kesatuan. “Maratua punya pesona luar biasa. Kalau alamnya kita jaga, generasi selanjutnya bisa tetap merasakan keindahan yang sama,” pesannya.

Kehadiran Zita Anjani di Pulau Maratua tak hanya meninggalkan kesan bagi wisatawan dan warga, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong promosi pariwisata sekaligus edukasi lingkungan di daerah-daerah.

**(DINI DIVA APRILIA)**



**Berau  
Terkini**  
tak berhenti

#### DIREKSI

**Komisaris** : M. Syaifuddin Zuhrie  
**Direktur** : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Iklan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

**Advokat & Konsultan Hukum** : Firma Hukum H.A.M & Partner

**Email Redaksi** : berauterkini2023@gmail.com, **Iklan dan informasi** : berauterkini2023@gmail.com  
**Alamat Redaksi** : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, **Telepon** : 0851-6366-0045

#### SUSUNAN REDAKSI

**Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi** : Robithoh Johan Palupi,  
**Koordinator Liputan** : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Nadya Zahira, **Grasis** : Surya Adji Permana,  
**Media Sosial** : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.